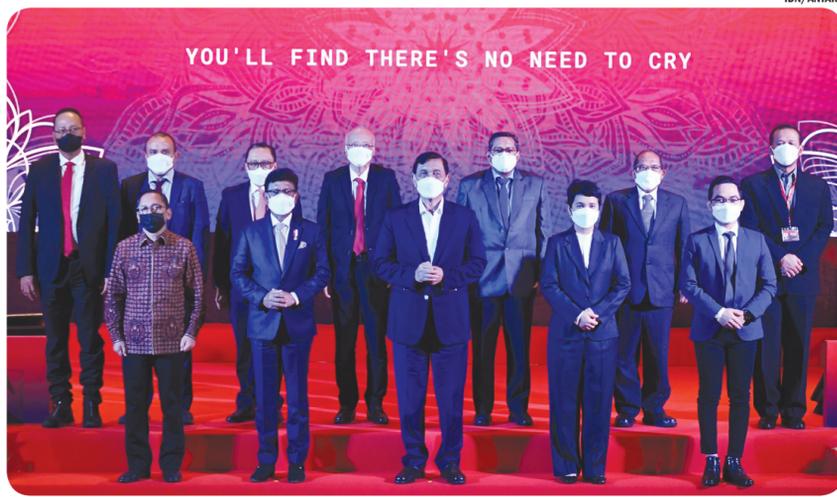


KICK OFF DEWG PRESIDENSI G20
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (depan, tengah), Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate (depan, kedua kiri) dan jajaran pejabat Kemenkominfo berfoto usai membuka acara "kick off" Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia di Jakarta, Selasa (15/3). Forum DEWG G20 akan memuat tiga isu utama, antara lain konektivitas digital dan pemulihan pascapandemi, kecakapan digital dan literasi digital, serta arus data lintas negara guna membantu mendorong tumbuhnya investasi di sektor ekonomi digital.



IDN/ANTARA

Airlangga Ajak Pelaku UMKM Manfaatkan KUR

Airlangga Hartarto mengapresiasi pihak swasta seperti PT Sampoerna yang turut dalam pengembangan UMKM dengan melaksanakan pembinaan melalui program SRC sejak tahun 2008.

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bandung bina

LPEI Adakan FGD Pelaku UKM untuk Tingkatkan Ekspor Industri Batik

JAKARTA (IM) - Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan yang dimandatkan untuk meningkatkan ekspor nasional, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terus memperluas kerja sama dalam pengembangan industri yang berorientasi ekspor. Salah satunya di bidang industri batik.

Industri batik merupakan salah satu industri penyerap tenaga kerja yang tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, industri ini sangat berpotensi untuk terus dikembangkan. Tercatat 47 unit usaha batik dari 101 sentra wilayah Indonesia mampu menyerap hingga 200 ribu tenaga kerja. Terlebih, UNESCO bahkan telah menobatkan Batik Indonesia sebagai salah satu warisan budaya di bidang Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity.

Untuk itu, LPEI bersama dengan Deskransada Surakarta, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, dan pelaku usaha ekspor Batik wilayah Solo dan sekitarnya menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Industri Fashion Batik Menuju Pasar Dunia" di Rumah Ekspor Solo.

"FGD ini bertujuan untuk

meningkatkan kapasitas dan kompetensi UKM menjadi mahir ekspor khususnya di Provinsi Jawa Tengah, mengkoordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem ekspor batik, serta meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi," kata Corporate Secretary LPEI Chesna F. Anwar, dilansir dari laman Kemenkeu, Selasa (15/3).

FGD yang melibatkan pelaku UKM Batik di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya ini berisikan sejumlah materi seperti potensi ekspor fashion batik, pengalaman ekspor batik, perkembangan fashion batik di dunia, serta sharing session pelaku UKM Ekspor Batik di wilayah Jawa Tengah.

"Kami sangat mendukung industri Batik yang ada di Kota Solo dengan adanya karnaval dan kampung batik. Kami juga mengapresiasi kegiatan ini yang merupakan wujud nyata pengembangan ekspor nasional khususnya industri Batik serta menginspirasi UKM di tengah kondisi perekonomian saat ini. Sinergi dan kolaborasi seperti ini tentu sangat dibutuhkan untuk membawa industri batik melompat bersama menuju kancah internasional," kata Kepala Bagian Perekonomian Kota Solo Yanti. •pan

PLN Kantongi Pendanaan US\$380 Juta untuk Bangun PLTA Upper Cisokan

JAKARTA (IM) - PT PLN (Persero) melakukan kerja sama pendanaan US\$380 juta dari US\$610 juta yang direncanakan untuk mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Cisokan dengan total kapasitas 1.040 megawatt (MW) yang berada di perbatasan Kabupaten Bandung dan Cianjur, Jawa Barat.

Pendanaan ini ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara PLN dengan Kementerian Keuangan, Senin (14/3). Digelar di auditorium PLN Kantor Pusat, penandatanganan ini dilakukan melalui skema Subsidiary Loan Agreement (SLA).

Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto menyampaikan ini merupakan yang pertama bagi PLN dalam enam tahun terakhir. Menurutnya, kreditur fasilitas pinjaman tersebut merupakan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) yang merupakan bagian dari World Bank Group dengan total pendanaan US\$380 juta.

Proyek PLTA Upper Cisokan juga direncanakan akan didanai oleh Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dengan total pendanaan US\$230 juta dalam bentuk co-financing dengan World Bank dengan skema serupa.

"Kami sangat mendukung pembiayaan ini karena tujuannya

untuk membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan PLTA Upper Cisokan yang berbasis energi baru terbarukan (EBT) dari tenaga air, lebih sustainable, terjangkau, dan tentunya mencukupi pasokan listrik untuk masyarakat nantinya," ujar Hadiyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (15/3).

Hadiyanto menjelaskan di tengah pandemi Covid-19, PLN mendapatkan tingkat suku bunga yang sangat kompetitif dengan tenor cukup panjang, yaitu 24,5 tahun.

Di sisi lain, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, Nawal Nely menilai, pembangunan PLTA Upper Cisokan merupakan langkah tepat waktu dan krusial dalam proses transisi energi, baik dalam konteks global dan nasional.

Menurut Nawal, proyek ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) terkait pemerataan akses listrik, efisiensi penggunaan energi, serta memperbesar proporsi EBT pada portofolio energi primer PLN dalam jangka panjang.

PLTA ini akan mengurangi ketergantungan dan sensitivitas APBN terhadap gejolak harga komoditas utama, terutama minyak dan gas. "Ketiga, ini satu-satunya proyek yang sesuai antara durasi pinjaman dan life expectancy project, sehingga risiko refinancing, selain adanya bunga yang manageable, juga dapat ditangani," kata Nawal. •hen

PT HM Sampoerna Tbk yang tergabung dalam Sampoerna Retail Community (SRC) untuk memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Pemerintah hadir untuk mendukung UMKM melalui KUR dengan bunga hanya 3 persen, yang bisa dimanfaatkan UMKM untuk mengembangkan usaha," kata Menko Airlangga dalam dialog dengan UMKM SRC, seperti dikutip dari Antara, Selasa (15/3).

Airlangga pun mengapresiasi pihak swasta seperti PT Sampoerna yang turut dalam pengembangan UMKM dengan melaksanakan pembinaan melalui program SRC sejak tahun 2008.

Pada akhir 2021, program SRC telah menjangkau lebih dari 160 ribu toko kelontong di seluruh Indonesia, termasuk di

antaranya 21 ribu kelontong di Jawa Barat dan 3.000 di Kota Bandung.

Pembinaan UMKM yang diberikan kepada anggota SRC meliputi edukasi penataan toko, manajemen keuangan, pengembangan bisnis, dukungan bagi produk UMKM di lingkungan sekitar melalui "Pojoek Lokal", hingga literasi digital lewat aplikasi AYO SRC.

Dengan semangat gotong royong yang mengedepankan sinergi serta kolaborasi bersama berbagai pihak, diharapkan program yang bersifat pembinaan dapat memberi dampak jangka panjang.

Dalam dialog dengan Airlangga, pelaku UMKM SRC di Bandung mengungkapkan bahwa rata-rata omset bulanan mereka meningkat tiga kali

lipat setelah mendapatkan pembinaan.

Para pemilik toko kelontong juga menyampaikan kendala yang dihadapi saat ini antara lain kondisi penjualan yang masih belum stabil selama masa pandemi.

Selain berdialog, Menko Airlangga juga menyaksikan penyaluran KUR secara simbolis dari BNI kepada UMKM dan penyerahan CSR dari PT Sampoerna berupa oksigen konsentrat kepada Pemerintah Kota Bandung.

"Sebagai informasi, penyaluran KUR dari BNI di Jawa Barat hingga saat ini sudah mencapai Rp2,5 triliun dan di Kota Bandung sendiri sudah mencapai Rp819,84 miliar," kata Airlangga. •dro

Kemenkeu Jaga Penggunaan Sistem Informasi yang Aman dan Terintegrasi

JAKARTA (IM) - Kemajuan teknologi yang sangat pesat harus diimbangi dengan penguatan kewaspadaan dan peningkatan keamanan penggunaan sistem informasi pemerintah. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) termasuk salah satu instansi yang mengalami peningkatan signifikan dalam penggunaan sistem informasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola keuangan negara.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenku) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa penguatan keamanan sistem informasi di Kementerian Keuangan harus dilakukan untuk menjaga agar informasi dan teknologi yang digunakan tersebut aman sekaligus terintegrasi.

"Maka, saya ingin menyampaikan untuk pengelola IT Kementerian Keuangan agar melihat sistemnya secara keseluruhan, apakah memang aman kita memiliki berbagai macam aplikasi yang dibuat secara mandiri/sendiri-sendiri yang tersebar di berbagai

macam kantor, apakah informasi yang masuk ke dalam aplikasi tersebut tetap aman, apakah informasi transaksi yang ada di dalam situ juga aman. Jadi saya minta untuk melihat integrasi sekaligus integritas dari sistem TIK di Kementerian Keuangan," kata Suahasil pada Webinar Keamanan Informasi, Selasa (15/3).

Suahasil menekankan mengenai keamanan dari sisi pengguna dimana pengguna harus makin bertanggung jawab terhadap penggunaan sistem informasi. Setiap kantor baik vertikal maupun pusat harus bisa melakukan pengawasan dan senantiasa mengingatkan para pegawainya agar terus menjaga keamanan sistem informasi.

"Yang berikutnya, saya juga ingin meminta kepada seluruh staf Kementerian Keuangan bahwa dalam menggunakan sistem teknologi informasi kita memiliki tanggung jawab untuk tidak menyebarkan hoax yang tidak jelas sumber dan kualitas informasinya. Hati-hati, kalau informasi

itu salah maka itu menjadi fitnah. Sebaliknya, saya ingin mengingatkan kepada seluruh staf pegawai Kementerian Keuangan bahwa kita semua memiliki tugas menjadi pemersatu bangsa," ujarnya.

Lebih jauh, Suahasil ingin agar jajaran pegawai Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi mengenai kinerja pengelolaan APBN sebagai suatu instrumen yang sangat penting bagi negara dalam pembangunan.

"Gunakan teknologi informasi kita untuk membangun narasi tersebut dan gunakan network kita untuk menyebarluaskan dan persatukan bangsa. Kepada seluruh pegawai staf dan karyawan Kementerian Keuangan saya minta untuk menjaga kompetensi dan menjaga kepeduliannya terhadap keamanan informasi. Kita tetap harus jaga seluruh risiko penggunaan sistem informasi dan tentu kita harus berkolaborasi bersama," tegas Suahasil. •dot



IDN/ANTARA

TARGET PENERAPAN PEMBAYARAN TOL NIRSENTUH

Kendaraan melintas di jalan tol Merak-Jakarta di Kabupaten Serang, Banten, Selasa (15/3). Kementerian PUPR melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) menargetkan sistem pembayaran tol nirsentuh berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF) akan diterapkan 100 persen pada tahun 2023.



PULAUINTAN
General Contractor

PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

BNI Bagikan Dividen Rp2,72 Triliun

JAKARTA (IM) - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) membagikan dividen sebesar 25% dari laba bersih tahun buku 2021 atau setara Rp2,72 triliun. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dividen ini dibagikan tunai kepada pemegang saham.

Direktur Utama BNI Royke Tumilau mengungkapkan dengan memperhatikan komposisi saham milik pemerintah yang sebesar 60%, maka BNI akan menyetorkan dividen senilai Rp1,63 triliun ke rekening Kas Umum Negara. Sementara itu, atas kepemilikan 40% saham publik senilai Rp1,09 triliun akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing.

Dia menjelaskan, dividen tahun buku 2021 ini naik 3,3 kali lipat dari dividen tahun buku 2020 yang sebesar Rp820,1 miliar.

Dengan demikian, nilai dividen per lembar saham kali ini ditetapkan Rp146, naik 3 kali lipat lebih dibanding dengan tahun lalu sebesar Rp44. Pada tahun lalu pemerintah mendapat porsi dividen senilai Rp492,58 miliar ke rekening kas umum negara.

Dividen bagian publik atas kepemilikan 40% saham tercatat senilai Rp327,52 miliar.

RUPST juga memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebesar 75% dari Laba Bersih Perseroan atau senilai

Rp8,17 triliun akan digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan untuk pengembangan usaha berkelanjutan BNI ke depan.

Royke mengatakan pemegang saham mendukung sepenuhnya berbagai kebijakan strategis yang diambil pada 2021 dalam menghadapi tantangan dan dinamika bisnis yang cepat. Kebijakan-kebijakan strategis yang kami ambil antara lain adalah; Pertama, meningkatkan kualitas kredit melalui perbaikan manajemen risiko. Kedua, meningkatkan digital capability dalam memenuhi kebutuhan nasabah.

Ketiga, meningkatkan ekspansi bisnis secara berkelanjutan. Keempat, meningkatkan CASA dan FBI melalui peningkatan transaksi. Kelima, optimalisasi jaringan dan bisnis Internasional dengan memperkuat kerjasama partnership. Keenam, optimalisasi Kontribusi Perusahaan Anak. Dan, Ketujuh, optimalisasi Human Capital dalam mendukung bisnis Bank.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Keuangan BNI Novita Widya Angraini menuturkan bahwa RUPST juga menyetujui aksi korporasi perseroan untuk melakukan pengambilalihan saham PT Bank Mayora yang ringkasan rancangannya telah disetujui melalui keterbukaan publik pada tanggal 22 Januari 2022.

"Harapannya semua berjalan lancar, sehingga seluruh persetujuan dan persyaratan terkait dengan rencana pengambilalihan dapat selesai pada akhir April atau awal Mei 2022," kata Novita. •hen

Menperin Sebut Industri Otomotif Berkontribusi Menjaga Lingkungan Hijau

JAKARTA (IM) - Industri otomotif merupakan salah satu sektor yang mampu berkontribusi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini ditopang dengan struktur manufaktur sektor tersebut di dalam negeri yang terintegrasi sehingga turut mendorong daya saing hingga kancah global.

"Bahkan industri otomotif juga akan mendukung komitmen utama dalam Presidensi Indonesia di G20 pada tahun ini, yakni isu yang terkait dengan transisi menuju energi yang berkelanjutan," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada pembukaan Jakarta Auto Week (JAW) 2022 di Jakarta, Selasa (15/3).

Agus mengemukakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Indonesia mengedepankan langkah konkret dalam menghadapi isu lingkungan dan perubahan iklim. Dalam kaitannya dengan isu ramah lingkungan, Indonesia menargetkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030 sebesar 29 persen secara mandiri atau 41 persen jika mendapat dorongan internasional.

"Salah satu yang mencerminkan leading by example adalah penggunaan electric vehicle dalam penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia untuk para official," ungkapnya.

Selain itu, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kendaraan Low Carbon Emission Vehicle (LCEV). "Kami berharap pabrikan

untuk dapat melakukan percepatan produksi kendaraan emisi rendah karbon sehingga mendukung target pemerintah dalam menuju kendaraan yang ramah lingkungan," kata Agus.

Menurutnya, selain menjadi motor penggerak ekonomi nasional, industri otomotif juga sebagai sektor yang ikut menyumbang signifikan dalam penerapan mobilitas hijau yang rendah emisi.

"Hal ini dibuktikan melalui program LCEV, dan juga nanti ada komitmen terhadap implementasi Euro 4. Mulai tanggal 12 April sudah ada ketentuan atau regulasi bahwa mobil baru yang diproduksi itu sudah harus berstandar Euro 4," paparnya.

Menperin pun memberikan apresiasi kepada para pabrikan yang siap menerapkan kebijakan tersebut. "Dalam ajang JAW 2022, sudah ada penandatanganan penjualan produk Euro 4, dan ini menjadi salah satu simbol bahwa industri otomotif di Indonesia sudah siap untuk memproduksi kendaraan yang berteknologi Euro 4," tuturnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah memiliki komitmen untuk mengakselerasi pembangunan ekosistem kendaraan listrik. "Kami juga sedang memacu percepatan TKDN-nya. Apalagi dalam waktu dekat, kita sudah bisa memproduksi baterai untuk electrical vehicle. Kami berharap para industri menyiapkan komponen lain yang dapat mendukung produksi electrical vehicle di dalam negeri," ujarnya. •dro